

# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## LKjIP 2020



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 29 Januari 2021

**KEPALA PELAKSANA BPBD KAB.BONE**



**DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740815 199302 1 006



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	12
1.5 Inovasi Pelayanan Publik .....	12
1.6 Sistematisasi Penyajian .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	19
2.1 Rencana Strategis.....	19
Visi dan Misi Kabupaten Bone .....	20
Tujuan dan Indikator Kinerja.....	21
Sasaran dan Indikator Kinerja.....	22
Program untuk Pencapaian Sasaran .....	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	23
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	24
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi.....	28
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020.....	29
Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
Perbandingan Capaian Kinerja .....	32
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini	
Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
- Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir	
renstra	
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	
Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun	
kegagalan	
Pencapaian pernyataan kinerja	
3.2 Pencapaian IKU .....	47
3.3 Realisasi Anggaran .....	47
3.4 Permasalahan dan solusi .....	50
BAB IV PENUTUP.....	50
LAMPIRAN.....	51

## Daftar Tabel

1.1 Jumlah Pegawai BPBD .....	9
1.2 Data Pegawai BPB Berdasarkan Tingkat Golongan .....	10
1.3 Data Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural .....	11
1.4 Data Pegawai BPBD berdasarkan Eselon .....	11
2.1 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPBD .....	21
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	22
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 .....	23
2.4 Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2020 .....	23
2.5 IKU BPBD .....	24
2.6 Rencana Belanja BPBDT.A 2020 .....	25
2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2020.....	25
3.1 Skala Ukuran Ordinal.....	28
3.2 Pencapaian Indikator Sasaran .....	29
3.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020.....	29
3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
3.5 Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	31
3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana .....	32
3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	33
3.8 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap target Akhir Renstra (sasaran 1).....	34
3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (sasaran 1) .....	36
3.10 Program dan Kegiatan (sasaran 1) .....	37
3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana .....	39
3.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 .....	39
3.13 Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap target Akhir Renstra (sasaran 2).....	40
3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (sasaran 2) .....	41
3.15 Program dan Kegiatan (sasaran 2) .....	41
3.16 Hasil Evaluasi SAKIP .....	42
3.17 Capaian Indikator Sasaran Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP .....	43
3.18 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 .....	43
3.19 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap target Akhir Renstra (sasaran 3).....	43
3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (sasaran 3) .....	44
3.21 Program dan Kegiatan (sasaran 3) .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Umsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone yaitu sebagai berikut:



a. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah

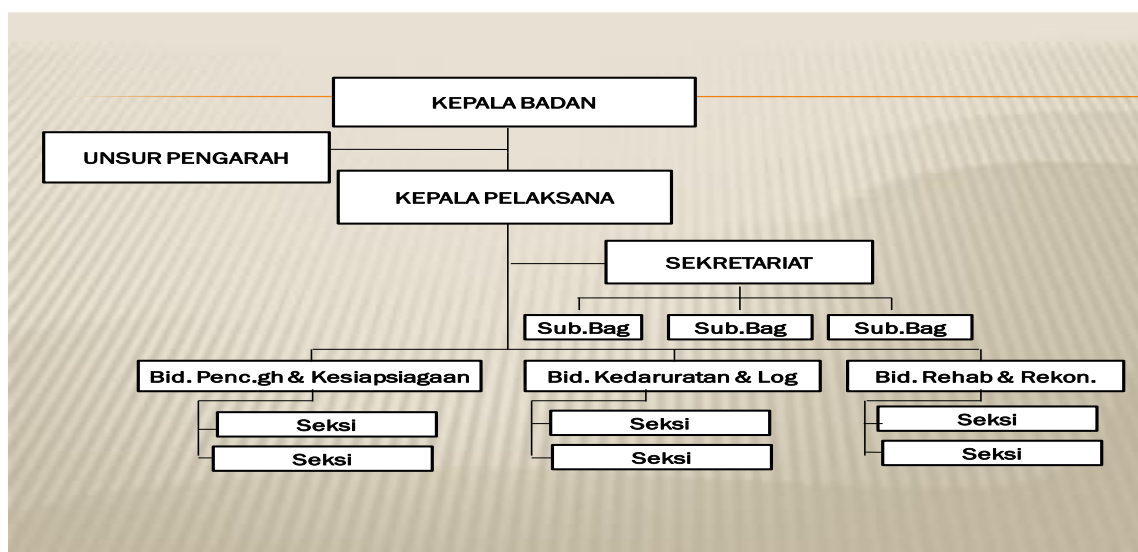
1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bonemempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone

c. Struktur Organisasi



Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Unsur pengarah**

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan;
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **2. Unsur pelaksana**

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
  - b. Komando;
  - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan rincian sebagai berikut :

#### **1) Kepala Badan**

Mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Kepala Badan Mempunyai Tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
- d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
- g. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2) Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Memantau dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **3) Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

## **4) Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Sub.bagian :

- a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub. Bagian Program

## **5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat.untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  - c. Pelaksanaan Hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - d. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  - e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- ◆ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (Dua) seksi :
- a. Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

#### **6) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - f. Melaksanakan tugas – Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ◆ Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (Dua) Seksi :
- a. Seksi Tanggap Darurat
  - b. Seksi Perbaikan dan bantuan darurat.

#### **7) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di



bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang Penanggulangan Bencana pada pascabencana.
  - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
  - c. Penyusunan Perencanaan di bidang Penanggulangan Bencana Pascabencana.
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ◈ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (Dua) seksi:
- a. Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
  - b. Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- Seksi Tanggap Darurat
- Seksi Perbaikan dan Bantuan Darurat

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
- Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIb) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIIb) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIIb) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) 9 (sembilan) orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

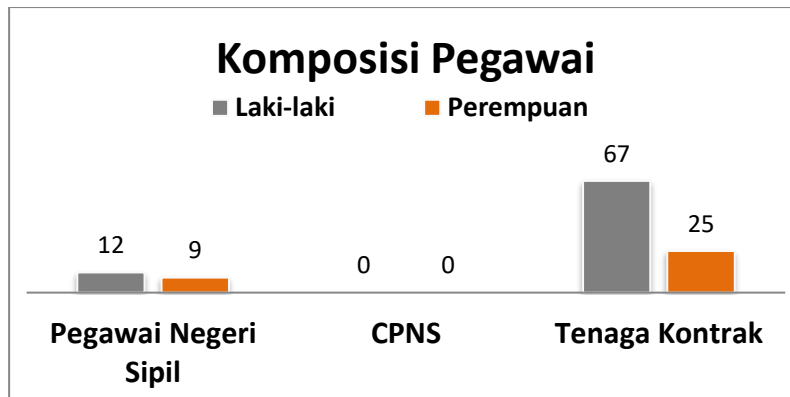
Susunan kepegawaian dan jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

### **Jumlah Pegawai**

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Bone berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1.**  
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak BPBD Kabupaten Bone  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2020

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		
		CPNS	PNS	Jumlah
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA/SEDERAJAT	-	5	5
4.	D3	-	1	1
5.	S1	-	5	5
6	S2	-	10	10
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>	<b>21</b>

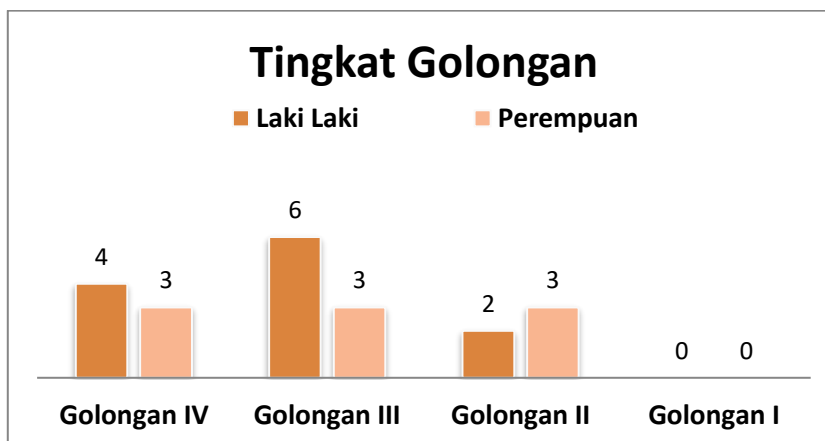


Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai BPBD Kabupaten Bone sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat Pendidikan sebagaimana diatas.

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**  
Pegawai BPBD Kabupaten Bone  
Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2020

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		CPNS	PNS	
1.	Gol. I	-	-	-
2.	Gol. II	-	5	5
3.	Gol. III	-	9	9
4.	Gol. IV	-	7	7
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>21</b>	<b>21</b>



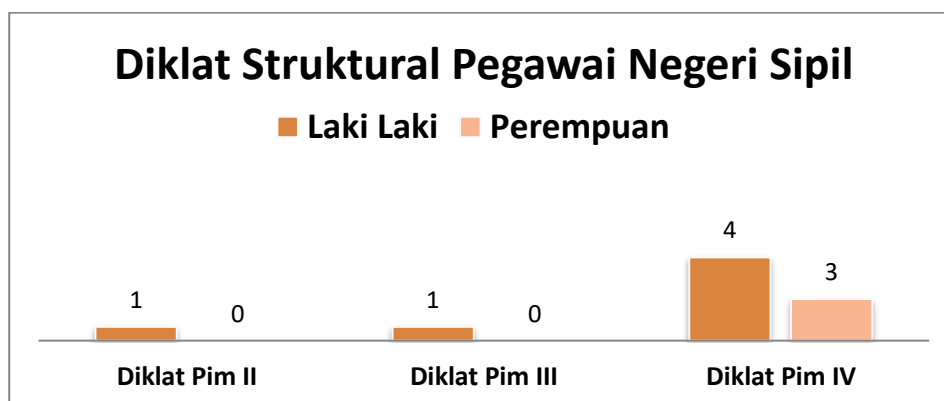
Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kabupaten Bone berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 23 %, Golongan III sebanyak 44%, dan Golongan IV sebanyak 33 % melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD Kabupaten Bone banyak ditempati oleh golongan II, III, dan IV dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Disamping pendidikan dan latihan Struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3.**

Data Pegawai Negeri Sipil BPBD Kabupaten Bone  
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural  
Tahun 2020

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Diklat Pim II	1
2.	Diklat Pim III	1
3.	Diklat Pim IV	7

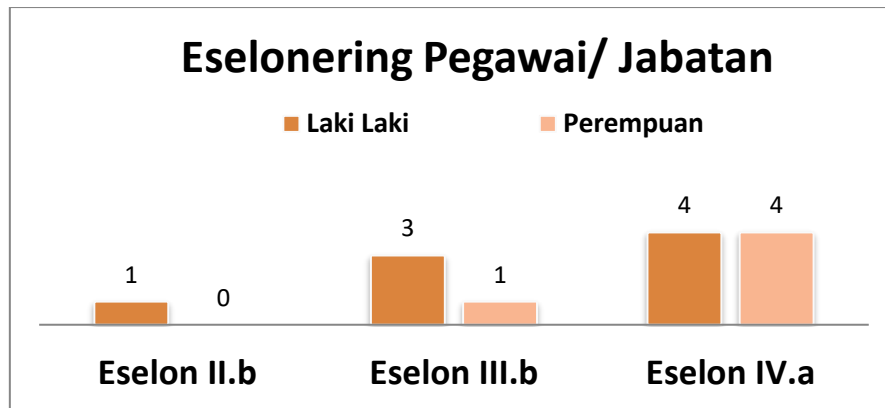


**Tabel 1.4**

Data Pegawai BPBD Berdasarkan Eselon  
Tahun 2020

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II.a	-
2.	II.b	1
3.	III.a	-
4.	III.b	4
5.	IV.a	8





#### 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana.

#### 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah **“GEMAR SIGAB” (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana)**.

Inovasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Inovasi ini dimulai dengan pemberian himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menstimulus kesadaran mereka terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Himbauan ini berupa tulisan dengan warna yang mencolok dan diletakkan di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, sekolah dan puskesmas.

Sosialisasi dan simulasi (gladi) yang dilakukan oleh Tim Inovasi BPBD mengambil peran penting dalam program ini. Sosialisasi dan simulasi ini dilakukan oleh tenaga terlatih dari BPBD Kab. Bone. Kegiatan ini melibatkan perwakilan unsur potensi sumberdaya manusia penanggulangan bencana. Kegiatan ini dirancang seperti terjadi bencana banjir besar dan gempa bumi dengan cakupan paparan yang luas. Pelaksanaan ini diawali dengan pembekalan peserta untuk mengingatkan peran masing-masing dalam kejadian bencana yang sebenarnya dan langsung dilakukan gladi. Pada kegiatan gladi tersebut juga untuk menguji kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumberdayakebencanaan.

Pada kegiatan simulasi (gladi) ini juga disertai dengan penentuan jalur evakuasi sebagai titik berkumpul warga ketika terjadi bencana. Masyarakat dibekali dengan keterampilan mengevakuasi korban bencana secara cepat, seperti menggunakan sarung dan bambu untuk membawa korban ke tempat evakuasi sebagai pengganti tandu. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk membentuk posko dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana.

Pembinaan pengembangan inovasi dilakukan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan melalui penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan berbagai informasi serta mampu berperan dalam membangun kehidupannya. Penyuluhan sosial merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana alam. Penyuluhan sosial dilakukan agar setiap proses penanggulangan bencana memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan, baik terhadap masyarakat yang terkena bencana maupun terhadap pihak terkait lainnya.

Fungsi penyuluhan sosial dalam upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif, penyuluhan sosial dilakukan untuk mulai menggerakkan masyarakat agar mampu waspada dan mengantisipasi bahaya bencana.
2. Sosialisasi, berfungsi untuk menyebarkan berbagai informasi awal mengenai rencana *tindak mitigasi* bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, *rehabilitasi*, maupun kegiatan *rekonstruksi*.
3. Preparasi, yaitu untuk menyiapkan masyarakat agar selalu siap dan tanggap untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah di wilayah bencana.
4. Promosi, yaitu untuk mendukung pemerintah agar setiap upaya positif dalam *penyuluhan sosial* atas penanggulangan bencana berjalan aktif dan permanen.
5. Partisipasi, yaitu untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan berbagai *elemen* masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam.
6. Desiminasi, yaitu untuk menyebarluaskan program-program pemerintah melalui penyuluhan sosial sebagai upaya penanggulangan bencana alam.

Sebagai kelanjutan dari serangkaian kegiatan ini, maka BPBD Kab. Bone membentuk Tim Gemar Sigab di setiap Desa dan Kelurahan. Tim Gemar Sigab ini bertugas untuk membantu BPBD Kab. Bone untuk mengawasi desa yang didiaminya. Dalam tim ini, Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi penggerak utama. Anggota-anggota Tim Gemar Sigab belajar dan berlatih kegiatan yang harus perlu dilakukan dalam masa pra-bencana, masa tanggap darurat, dan masa pasca bencana. Tim ini akan dipimpin oleh orang yang disepakati masyarakat. Tugas ini tidak harus menjadi beban pemimpin formal (Ketua RT/ RW/ Kelurahan) namun bisa diambil dari anggota masyarakat yang disepakati. Tugas Tim Gemar Sigab ini antara lain:

1. Menyiapkan tanda bahaya yang disepakati dan mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat;

2. Menyiapkan tempat evakuasi dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan (tenda, genset dan lampu-lampu, bahan makanan kering, air minum dalam kemasan, peralatan masak dll);
3. Menginventarisasi potensi warga dalam hal keahlian misalnya dokter, perawat, instalasi listrik, tukang masak,;
4. Menginventarisir sarana yang diperlukan misalnya kendaraan, alat komunikasi, alat P3K.dll.

Tim ini memiliki struktur sendiri yang terdiri dari:

1. Koordinator Umum Tim
2. Seksi Siaga, bertugas untuk peringatan dini dan pemetaan.
3. Seksi Tanggap Darurat, bertugas untuk menyiapkan penyelamatan, pengungsian dan mengurus logistik.
4. Seksi Komunikasi, bertugas untuk mendokumentasikan dan menjalin informasi hubungan luar.
5. Seksi Kesejahteraan, bertugas untuk melakukan pertolongan pertama dan dapur umum.

Tim ini tetap berkoordinasi langsung dengan pihak BPBD Kab. Bone.

Adapun inovasi **DengSiba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)**. Dalam Upaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Badan Penanggulangan Desa Rama Anak di 5 Kecamatan yakni Kec. Dua Boccoe , Kec. T.Riattang Barat , Kec. Cina , Kec. Awangpone dan Kec. Libureng di implementasikan melalui kegiatan rintisan desa rama anak dengan pengembangan inovasi Deng Siba( Desa Siaga Bencana Peduli Difable ).

Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan advokasi untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak . selama ini program dan kegiatan termasuk pembangunan , anak-anak hanya dijadikan objek dan tidak semua haknya terpenuhi , termasuk untuk berkumpul dan berpendapat itu belum ada ruang untuk anak kedepan, ingin dalam pembangunan dipikirkan juga untuk kenyamanan anak.

Dengan memberikan kegiatan rintisan desa ramah anak khususnya di BPBD ada upaya penanganan terhadap korban khususnya anak baik sebelum saat dan setelah bencana yang menimpa anak itu lebih mahal di bandingkan dengan upaya pencegahan. Pendekatan melalui system itulah yang akan dilakukan bersama dalam menciptakan suatu lingkungan yang terlindungi bagi anak dalam memenuhi hak-hak mereka .

Jumlah anak penyandang disabilitas dalam keterlibatan penyelenggaraan penanggulangan bencana laki-laki dan perempuan:

✚ Laki-laki : 3.304 orang

✚ Perempuan : 3.078 orang

Tujuan dari inovasi Deng Siba ini yaitu memberikan peluang atau adanya keterlibatan difable dalam penanggulangan bencana. Manfaatnya yaitu meningkat ya kepedulian masyarakat terhadap difable dalam setiap program dan kegiatan.

Pada tahun 2020 inovasi DengSiba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable) dan Gemar Sigab (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana) terlaksana melalui pembagian

masker dikarenakan adanya bencana non alam yaitu COVID-19.

Inovasi **SiPena (Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah)**. Sekolah siaga bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif disekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari sekolah siaga bencana yaitu membangun budaya siaga dan budaya aman sekolah dengan mengembangkan jenjang sesama para berkepentingan di bidang penanganan bencana, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tentang belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah

Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2017

✚ Laki-laki : 100

✚ Perempuan : 150

Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2018 di 20 Sekolah Kab. Bone yaitu 500 orang

✚ Laki-laki : 441

✚ Perempuan : 559

Di tahun 2019 jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana disekolah yaitu 30 sekolah dengan peserta 1500 orang yakni Laki-laki : 696 siswa Perempuan : 804 siswi

Di tahun 2020 Inovasi SiPena (Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah) terlaksana di 6 sekolah sebelum adanya bencana non alam (COVID-19).

Tujuan dari inovasi SiPena ini yaitu Siswa atau siswi di sekolah mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan setelah bencana Meningkatkan upaya Sistem Informasi Penanggulangan Bencana.

### **Dokumentasi Inovasi**

#### **Si Pena (Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah)**









## **1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

### **1. Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

### **2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA**

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### **3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2020

### **4. Bab IV : PENUTUP**

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten



Bone 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Bone. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2018-2023 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

### 2.1.1 VISI

Berdasarkan Visi Bupati Bone 2018– 2023 yaitu “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Dapat diuraikan bahwa **Mandiri** berarti Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan, **Berdaya Saing** berarti terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional, sedangkan **Sejahtera** berarti meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.1.2 MISI

Dari uraian Visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berkaitan dengan misi tersebut urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sangat erat kaitanya dengan misi ke 1 dan 3 yaitu :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*
- Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya*

### 2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Misi 3 : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya

Tujuan : Meningkatkan Responsibilitas Penanganan Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
*Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPBD*

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Indeks	C	A
Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	%	11	100
	Presentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	74	100
	Presentase Masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP	%	100	100
	Persentase rehabilitasi/rekonstruksi daerah korban pasca bencana	%	100	100

#### 2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran : - Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana

Tujuan 2 Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana

Sasaran : - Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

- Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Indeks	C	A
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	%	11	100
	Presentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	74	100
	Presentase Masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP	%	100	100
Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase rehabilitasi/ rekonstruksi daerah korban pasca bencana	%	100	100

### 2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana

### 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone  
Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Indeks	B
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	%	56
	Presentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	86
	Presentase Masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP	%	100
Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase rehabilitasi/ rekonstruksi daerah korban pasca bencana	%	100

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilakukan revisi pada tahun 2018 dan telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Tanggal 13 November 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Data pemantauan daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat}}{\text{jumlah seluruh korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam masa pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}} \times 100\%$	Rekap data Identifikasi dan verifikasi kerusakan akibat bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 8.776.886.678** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Badan Penanggulang an Bencana Daerah TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.109.572.027	24
2	Belanja Langsung	Rp. 6.667.314.651	76
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 8.776.886.678</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE ANGGA RAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.127.932.558,00</b>	19,80 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	62.687.809,00	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	567.456.000,00	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	294.104.749,00	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	203.684.000,00	
		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>96.187.295,00</b>	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3.293.000,00	
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	84.385.000,00	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	8.509.295,00	
		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>30.236.200,00</b>	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.236.200,00	
		<b>Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>66.110.700,00</b>	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	31.110.700,00	
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	35.000.000,00	
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>213.401.877,00</b>	3,20%
		Pemantauan Daerah Rawan Bencana	27.671.392,00	

			Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	124.200.000,00	
			Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	42.480.485,00	
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA)	19.050.000,00	
	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		91.054.119,00	1,37%
			Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	61.954.119,00	
	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	29.100.000,00	
	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana		5.042.391.902,00	75,63%
			Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	55.501.902,00	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	4.986.890.000,00	
JUMLAH				6.667.314.651,00	100%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp. 5.042.391.902** dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung indicator sasaran Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana sebesar dengan besaran 75,63%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana yaitu sebesar 19,80%, indicator sasaran Persentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana sebesar 3,20% . Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah indicator sasaran Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dan Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP sebesar 1,37% dari total anggaran belanja langsung.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020. Akuntabilitas kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100\%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 3 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 1 indikator kinerja, Sasaran 3 terdapat 1 indikator kinerja.

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	3	BS = 2 C =	B = 1 K =	SK =
2.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	1	BS = C =	B = 1 K =	SK =
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	1	BS = C =	B = 1 K =	SK =
	JUMLAH		BS = 2 C =	B = 3 K =	SK =

### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

Nilai akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target B, Pengukuran Capaian indikator Kinerja didasarkan pada Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang pelaksanaannya yang dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga informasi mengenai realisasi target kinerja untuk tahun 2020 belum dapat disajikan dalam laporan kinerja tahun 2020. Adapun pelaksanaan evaluasi Sakip yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 adalah evaluasi terhadap dokumen SAKIP tahun 2019, yang pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	56%	100%	178%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	86%	90%	104%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	85%	85%
2.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekons truksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulanga n Bencanaan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100%

### 3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulanga n Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	56%	100%	178%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	86%	90%	104%
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	85%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana</b>			
1.	Baik Sekali	2	178% dan 104%
2.	Baik	1	85%
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>		
<b>Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100%
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100%
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		



Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diketahui bahwa 2 indikator sasaran atau 243% dan 104% Baik Sekali, 3 indikator sasaran 100% dikategorikan baik.

### 3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota bahwa Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2018 telah diatur dalam hal penyusunan SPM namun hal ini dalam hal penyusunan dokumen SPM, BPBD memiliki laporan tersendiri. Adapun jenis pelayanan dasar yang dilaporkan yakni pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### *Sasaran 1*

##### *Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana*

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	56%	100%	178%
b.	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	86%	90%	104%

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
c.	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	85%	85%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana, dengan capaian **178% telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100%, dari target 56% dengan persentase 178% Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat, dengan capaian **104% lebih dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 90%, dari target 86% dengan persentase 104%. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP, dengan capaian **85% kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 85% dari target 100% dengan persentase 85%. Capaian ini dikategorikan **Baik**.

#### b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target		Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	26%	41%	56%	11%	100%	100%	26%	243%	178%
b.	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	78%	82%	86%	87%	42,6%	90%	111%	52%	104%
c.	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	50%	85%	100%	50%	85%

Pada tahun 2020 Capaian indicator kinerja presentase kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dari target 56% mencapai 178% mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 26% dan pada tahun 2019 mencapai 243% dari target 41%, capaian indicator kedua presentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat yaitu 90% dari target 86% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian indicator Presentase masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP yakni 85% dari target 100% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 50%.

**c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra**

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir  
Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	100%	100%	100%
	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	90%	104%
	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	85%	85%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dimana realisasi hingga Tahun 2020 pada indikator kesatu mencapai 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini 243% dan indikator kedua realisasinya mencapai 90% dari target sebesar 86% sehingga capaian kinerja pada indikator ini 104%, untuk indikator ketiga mencapai 85% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini 85%

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

1. Persentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan dan tanah longsor. Kabupaten Bone adalah Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan terdiri dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 4,459 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bontocani merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Bone dengan Luas Wilayah 465,35Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Tanete Riattang merupakan Kecamatan terkecil di Kabupaten Bone dengan Luas Wilayah 23,79Km<sup>2</sup>, Curah Hujan tertinggi di Kabupaten Bone terjadi pada Mei 2017 dengan curah 589 mm<sup>3</sup> Rata-rata lama Penyinaran matahari tertinggi di Kabupaten Bone terjadi pada bulan Oktober 2017 dengan suhu udara tahun 2017 berkisar 25,1<sup>0</sup>C – 27,6<sup>0</sup>C. Pada tahun 2020 curah hujan di Kabupaten Bone tertinggi pada bulan juni dengan curah 556 mm<sup>3</sup> dan rata-rata lama penyinaran matahari dengan suhu udara berkisar 24,8<sup>0</sup>C – 28,0<sup>0</sup>C.

Kondisi lingkungan yang terus mengalami tekanan sebagai akibat kejadian bencana alam yang terjadi setiap tahun, menyebabkan lingkungan sebagai sumber utama kehidupan.

Berdasarkan Tabel 3 capaian indikator kinerja sasaran 1 dengan indikator Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana adalah sebanyak 27 kecamatan yang harus memiliki peta rawan bencana, di tahun 2020 bahwa 27 kecamatan sudah memiliki peta rawan bencana melalui penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) atau 100% artinya telah mencapai target.

## 2. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Berdasarkan dari kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2019 kejadian yang terjadi yaitu kebakaran 49 kejadian, kebakaran lahan 8 kejadian, puting beliung 14 kejadian, banjir 4 kejadian dan longsor 7 kejadian. Pada tahun 2020 kejadian yang terjadi yakni kebakaran 34 kejadian, puting beliung 17 kejadian, banjir 14 kejadian, longsor 4 kejadian dan gagal teknologi 1 kejadian.

Kegiatan penyaluran bantuan pada tahun 2020 tersalur ke 106 KK pada 16 Kecamatan dan ditambah anggaran BTT Kabupaten dengan jumlah KK penerima bantuan korban banjir 4.763 KK.

Persentase jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat terealisasi pada tahun 2020 mencapai 90%, dari target 86% dengan presentase 104%. Capaian ini dikategorikan **Baik Sekali**. Pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## 3. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP

Dari data hasil rekapan bidang kedaruratan dan logistic pencapaian presentase masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP menunjukkan pencapaian kinerja yang tahun ketahun yakni 100%, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan hanya mencapai 50% dikategorikan kurang dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena akses menuju lokasi pada saat kejadian memerlukan respon time yg sesuai prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 85% dari tahun sebelumnya.

#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dapat dilihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk melihat tingkat efisiensi pada sasaran ini disajikan dalam table berikut :

*Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	178	100	78%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	104	100	4%
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	85	100	(-15%)

Pencapaian kinerja pada 1 yaitu indicator persentase kecamatan yang memiliki peta rawan bencana telah dianggap berhasil dari sasaran ini karena mampu menunjang pencapaian kinerja dengan capaian kinerja 178%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran tersebut adalah 78%. Pada indikator 2 telah berhasil karena mampu menunjang pencapaian kinerja dengan realisasi 90% dari target 86% jadi capaian kinerjanya mencapai 104% , sedangkan indikator 3 dari sasaran ini belum mampu sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja karena capaian kinerja kurang dari target. Realisasi indikator 3 mencapai 85% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 85% tapi dikategorikan baik, sedangkan presentase keuangannya 100 %.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>213.401.877</b>	<b>213.401.877</b>	<b>100%</b>
		- Pemantauan Daerah Rawan Bencana	27.671.392	27.671.392	100%
		- Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	124.200.000	124.200.000	100%
		- Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	42.480.000	42.480.000	100%
		- Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	19.050.000	19.080.000	100%
2.	- Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat - Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangan i Tepat Waktu sesuai SOP	<b>Program Kedaruratan Logistik Penanggulangan Bencana</b>	<b>91.054.119</b>	<b>91.054.119</b>	<b>100%</b>
		- Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	61.954.119	61.954.119	100%
		- Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	29.100.000	29.100.000	100%



Program dari sasaran ini adalah Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan Logistik Penanggulangan Bencana. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dengan capaian sebesar 100%, Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dengan realisasi 90% capaian 104% dan Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP 85%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program-program ini adalah sebesar Rp.304.455.996,- realisasi sebesar Rp.304.455.996,- atau 100% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Pemantauan Daerah Rawan Bencana sebanyak 9 kali, Pemberdayaan Posko Siaga Bencana sebanyak 4.380 kali yakni makan minum posko, Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah di 6 Sekolah, Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana yaitu 26 kali, Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana terdiri dari 8 jenis Kebutuhan Dasar yakni mie instant, air mineral gelas, gula pasir, minyak goreng, ikan kaleng, sarung, terpal dan beras sebanyak 75 per itemnya.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain belum memadainya sarana, prasarana dan sumber daya aparatur pendukung penanganan korban bencana. Pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan bencana solusi nya adanya dukungan pemerintah pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar. Permasalahan yang lain terkait sasaran ini Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok rentan solusi dari permasalahan ini adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas.

## **Sasaran 2**

*Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana.*

### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran**

Tabel 3.11  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100% dengan capaian 100% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

### **b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.12. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target		Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 100%, sama dengan tahun 2018 dan 2019 capaiannya 100%.

c. **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023**

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir  
Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dimana realisasi hingga Tahun 2020 pada indikator sasaran ini mencapai 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini 100%.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja yaitu 100% dengan capaian 100% *telah mencapai target* yang telah ditetapkan, dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh adanya kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan terdampak bencana sebanyak 4 paket di Desa Siamen Kec. Palakka, Desa Data kec. Mare, Desa Pattimpa Kec. Ponre, Desa Cinennung Kec. Palakka yang terealisasi.

e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran meningkatnya pemulihan penanganan pasca bencana, telah mencapai kinerja sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebanyak 75,65% dari total anggaran yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	87%	13%

Pencapaian kinerja indikator dari sasaran ini mampu menunjang pencapaian kinerja dengan Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 87% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran tersebut adalah 13%.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Tabel.3.15 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Rehabilitasi/ Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana</b>	<b>5.042.391.902</b>	<b>4.400.293.352</b>	<b>87%</b>
		- Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	55.501.902	55.501.902	100%
		- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	4.986.890.000	4.344.791.450	87%

Program dari sasaran ini adalah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada

Tahapan Pasca Bencana. Program ini bertujuan Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana dengan capaian sebesar 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.5.042.391.000,- realisasi sebesar Rp.4.400.293.352,- atau 87% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana sebanyak 29 kali dan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana sebanyak 4 Paket, pada kegiatan ini realisasi anggaran hanya mencapai 87% disebabkan masih adanya sisa tender dan menurut aturan petunjuk terkait dengan sisa tender masih bisa di manfaatkan dan masih bisa diajukan dalam penganggaran RKA dan DPA.

#### g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana sehingga upaya pemulihan pasca bencana juga belum optimal. Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat perhitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

### *Sasaran 3*

#### *Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana*

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Nilai akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target B, Pengukuran Capaian indicator Kinerja didasarkan pada Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2021 , sehingga informasi mengenai realisasi target kinerja dan presentase capaian kinerja untuk tahun 2020 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.16  
Hasil Evaluasi SAKIP

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tahun Anggaran 2018	CC	B	114%
2.	Tahun Anggaran 2019	B	B	100%

3.	Tahun Anggaran 2020	B	B	100%
----	------------------------	---	---	------

Tabel 3.17  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa target pada indikator kinerja sasaran 3 dengan target predikat B dengan realisasi B atau persentase capaian 100%.

**b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.18 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Base Line	Target		Realisasi			Capaian		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	B	B	114%	100%	100%

Realisasi di tahun 2018 pada sasaran ini dari target CC terealisasi B indeks atau presentase capaian kinerjanya mencapai 114% dengan kata lain lebih dari target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja predikat evaluasi sakip oleh apip yaitu B indeks dari target B indeks maka capaian kinerjanya mencapai 100% maka hal ini di tahun 2019 telah mencapai target. Pada Tahun 2020 kinerja mencapai 100% maka hal ini mencapai target yaitu B realisasi B.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023**

Tabel 3.19  
Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir  
Renstra 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Akhir	Realisasi Hingga 2020	Capaian Kinerja
1.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Indeks	A	B	63,62%



Capaian Kinerja ini didapatkan dari laporan hasil evaluasi inspektorat daerah atas implementasi sakip di tahun 2019 dengan orientasi penilaian dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menargetkan predikat B dengan realisasi predikat B atau 100% maka indicator dari sasaran ini telah mencapai target. Predikat yang dicapai pada Tahun 2020 dikategorikan Baik sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- ✚ Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat kabupaten Tahun 2019
- ✚ Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- ✚ Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini.

*Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penanggulangan bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100	98	2%

Pencapaian kinerja indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP mampu menunjang pencapaian kinerja dengan Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 98% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran tersebut adalah 2%.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Tabel.3.21 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.182.999.000</b>	<b>1.086.298.958</b>	<b>93%</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	62.687.809	62.687.809	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	567.456.000	525.733.400	93%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	294.104.749	294.194.749	100%
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	203.684.000	203.683.000	100%
		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>96.187.000</b>	<b>94.240.813</b>	<b>98%</b>
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3.293.000	3.293.000	100%
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	84.385.000	82.438.518	98%
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	8.509.295	8.509.295	100%

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>30.236.200</b>	<b>30.236.200</b>	<b>100%</b>
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.236.200	30.236.200	100%
		<b>Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>66.110.700</b>	<b>66.110.700</b>	<b>100%</b>
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	31.110.700	31.110.700	100%
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	100%

Berdasarkan tabel diatas dari keempat program pada tabel diatas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah namun demikian selain program tersebut juga terdapat dua program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan dari program ini adalah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar **Rp. 1.320.466.753** realisasi sebesar **Rp. 1.276.886.671** atau **97%** dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
4. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
5. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

## 10. Pengelolaan Website Perangkat Daerah

### g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.

Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

## 3.2 PENCAPAIAN IKU

Dari sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana terdapat 3 indikator, pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana, dengan capaian **178 % telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% , dari target 56% dengan persentase 178% Capaian ini dikategorikan Baik Sekali. Pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat, dengan capaian 104% **melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 90%, dari target 86% dengan persentase 104% Capaian ini dikategorikan Baik Sekali, dan pada indikator kinerja utama 3 yaitu Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP, dengan capaian 85% **kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 85% dari target 100% dengan persentase 85%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Sasaran Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana terdapat 1 indikator yaitu Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana . Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan **Baik**.

## 3.3 REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.077.401.730,- (92,03%)

Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.096.205.711,-	(99,36%)
- Belanja Langsung	Rp. 5.981.196.019,-	(89,70%)
Jumlah	Rp. 8.077.041.730,-	(92,03%)

## 2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.096.205.711,- (99,36%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp.	1.360.169.303,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp	736.036.408,-
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp	0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.981.196.019,- (98,66%) dengan jumlah 7 program dan 19 kegiatan.

## 3.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum adanya dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana.
2. Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok yang rentan.
3. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral, belum dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Belum terbangunnya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam sistem penanggulangan bencana
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar
3. Adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas
4. Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional

5. Adanya Regulasi yang mengatur bahwa pengurangan resiko bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat dan dunia usaha
6. Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintahan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone pada tahun 2020 adalah cukup baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, 2 indikator yang telah mencapai target dan 1 indikator kurang dari target.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone ke depan. Bagi instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

# LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H.A. FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si  
Jabatan : Bupati Bone

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 02 Januari 2020


Pihak Kedua,

BUPATI BONE

  
DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si

Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN BONE

  
DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19740315 199302 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	5
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	1. Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana 2. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat 3. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	56% 86% 100%
3	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	1. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%

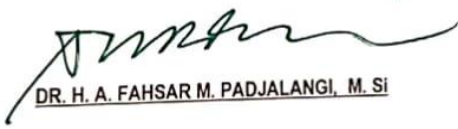
**PROGRAM/KEGIATAN**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum
5. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
6. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana


**ANGGARAN**

Rp	1,182,999,000
Rp	121,327,000
Rp	27,000,000
Rp	143,790,000
Rp	186,100,000
Rp	152,000,000
Rp	501,784,000

BUPATI BONE

  
DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si

Watampone, 02 Januari 2020  
KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. BONE

  
DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19740315 199302 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H.A. FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si  
Jabatan : Bupati Bone

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 22 April 2020

Pihak Kedua,

BUPATI BONE

DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si

Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN BONE

DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19740315 199302 1 006





**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	1. Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana 2. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat 3. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	56% 86% 100%
3	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	1. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,009,932,558
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 106,187,295
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 15,236,200
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 61,110,700
5. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp 91,054,119
6. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Rp 5,042,391,902
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp 141,401,877

**BUPATI BONE**

**DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si**

Watampone, 22 April 2020

**KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. BONE**

**DRAY VIBRIANTO, S.IP.-M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19740315 1993012 1 006



Capaian Kinerja dan realiasi anggaran Program Kegiatan Perangkat Daerah														
Urusan: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENS I	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMENDAS I DPRD
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN				
I	Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1,127,932,558.00	100	1,086,208,958.00	100.00	96.30	3.70			
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Jumlah Rekening Air dan Listrik yang Terbayar	Rekening	24	62,687,809.00	24	62,687,809.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfussing anggaran Covid 19		
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kali	576	567,456,000.00	576	525,733,400.00	100.00	92.65	7.35	5 orang Tenaga TRC disebabkan faktor kemalasan jadi tidak menerima upah selama 1 bulan	tindak lanjut melalui teguran	
3		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	Kali	-	-	0	-	0.00	0.00	0.00	Adanya reconfussing anggaran Covid 19		
4		Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan	70	294,104,749.00	70	294,104,749.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfussing anggaran Covid 19		
5		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan administrasi Perkantoran	Paket	48	203,684,000.00	48	203,683,000.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfussing anggaran Covid 19		
II	Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur	%	100	96,187,295.00	100	93,890,813.00	100.00	97.61	2.39			
6		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kegiatan	2	3,293,000.00	2	3,293,000.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfussing anggaran Covid 19		
7		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas operational	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Tahunan (STNK) secara rutin/berkala selama satu tahun anggarann	Paket	8	84,385,000.00	7	82,438,518.00	87.50	97.69	-10.19	1 unit kendaraan tdk terbayarkan	adanya kesesuaian penganggaran dan pembiayaan	
9		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	4	8,509,295.00	4	8,159,295.00	100.00	95.89	4.11	penganggaran melebihi target pemeliharaan peralatan	adanya kesesuaian penganggaran dan pembiayaan	

V	Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja	<b>Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	30,236,200.00	100	30,236,200.00	100.00	100.00	0.00			
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi yang Tersusun	Laporan	2	30,236,200.00	2	30,236,200.00	100.00	100.00	0.00	Adanya recofussing anggaran Covid 19		
VI	Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>	Persentase Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	%	100	31,110,700.00	100	31,110,700.00	100.00	100.00	0.00			
1		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah disusun	Dokumen	8	31,110,700.00	8	31,110,700.00	100.00	100.00	0.00	Adanya recofussing anggaran Covid 19		
2		Pengelolaan website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website Aplikasi / Database yang Dikelola	Kegiatan	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	100.00	100.00	0.00	Adanya recofussing anggaran Covid 19		
VII	Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan layanan pusdalops serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana	<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>	Cakupan Ketersediaan Logistik Penanggulangan Bencana	%	100	91,054,119.00	100	91,054,119.00	100.00	100.00	0.00	Laporan kejadian bencana dan data korban yang terkena dampak bencana masih belum sesuai harapan sehingga menyulitkan proses tanggap darurat khususnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban terdampak terutama bagi kelompok rentan	Adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas	
1		Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	Jumlah Peninjauan Lokasi dan Penanganan Korban Bencana	Kali	80	61,954,119.00	80	61,954,119.00	100.00	100.00	0.00	Adanya recofussing anggaran Covid 19		
2		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Jumlah kebutuhan dasar yang tersalur terhadap korban bencana	Jenis	8	29,100,000.00	8	29,100,000.00	100.00	100.00	0.00	Adanya recofussing anggaran Covid 19		

VIII	Identifikasi dan verifikasi serta minev kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana dan penyusunan dokumen baku terkait rencana rehab rekonstruksi berdasarkan peta rawan bencana	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahapan Pasca Bencana</b>	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	%	100	5,042,391,902.00	100	4,400,293,352.00	100.00	87.27	12.73	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar	Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintah	
1		Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana	Jumlah Lokasi yang diidentifikasi dan diverifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana	Kali	81	55,501,902.00	81	55,501,902.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfusing anggaran Covid 19		
4		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang terdampak bencana	Paket	4	4,986,890,000.00	4	4,344,791,450.00	100.00	87.12	12.88	Adanya sisa tender dari kegiatan dan menurut aturan, petunjuk terkait dengan sisa tender masih bisa di manfaatkan	Berdasarkan petunjuk pelaksana, bisa diajukan penganggaran dan pemanfaatan kembali sesuai tender dan mengajukan perubahan RKA dari penganggaran waktu ke Kemenkeu. Penganggaran dana hibah hanya sampai 30 desember 2020 dan telah diberikan persetujuan perpanjangan waktu selama 9 bulan	
XI	Peningkatan layanan informasi rawan bencana dan peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	Persentase Ketersediaan Data Kejadian Bencana Penanggulangan Bencana	%	100	213,401,877.00	100	213,401,877.00	100.00	100.00	0.00	Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana	Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional	
1		Pemantauan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Pemantauan Lokasi Daerah Rawan Bencana	Kali	30	27,671,392.00	30	27,671,392.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfusing anggaran Covid 19		
2		Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	Jumlah makan minum TRC yang melakukan posko siaga bencana	Kali	8760	124,200,000.00	8760	124,200,000.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfusing anggaran Covid 19		
3		Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah kegiatan PRB yang dihasilkan	Kegiatan	1	42,480,485.00	1	42,480,485.00	100.00	100.00	0.00	Adanya reconfusing anggaran Covid 19		
4		Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	Jumlah Sekolah yang menjadi Sasaran Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Sekolah	30	19,050,000.00	6	19,050,000.00	20.00	100.00	-80.00	Adanya Pandemi COVID 19 menyebabkan kegiatan sosialisasi di sekolah tidak dilaksanakan sepenuhnya	Penganggaran ke tahun berikutnya	

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Data pemantauan daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{jumlah seluruh korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam masa pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}} \times 100\%$	Rekap data Identifikasi dan verifikasi kerusakan akibat bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


**KEPALA PELAKSANA BPBD KAB.BONE**  
**DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740315 199302 1 006

# CASCAADING 2020

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)				Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya			
<b>TUJUAN</b>				<b>TUJUAN</b>			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana			
<b>SASARAN</b>				<b>SASARAN</b>			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana		Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana		Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana			
<b>INDIKATOR</b>				<b>INDIKATOR</b>			
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APiP		Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	
<b>PROGRAM</b>				<b>PROGRAM</b>			
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penunjang Pemerintahan Umum	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	
<b>KEGIATAN</b>				<b>KEGIATAN</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Pemantauan Daerah Rawan Bencana		Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Pemberdayaan Posko Siaga Bencana		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran					Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
				Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah		BPKAD, INSPEKTORAT, BPBD PROVINSI, BNPB, BASARNAS	
				BPKAD, BPBD PROVINSI, BNPB, BASARNAS, TNI / POLRI, PMI, PRAMUKA, PEMERINTAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, TOKOH MASYARAKAT, DINAS PENDIDIKAN, DUNIA USAHA		BAPPEDA, BPKAD, INSPEKTORAT, PUPR, BNPB, BPBD PROVINSI	
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>							
SEKRETARIAT				BIDANG KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	
						BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	

LAMPIRAN LKJIP  
CAPAIAN KINERJA OUTCOME  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME									
			KINERJA TAHUN 2020			PERBANDINGAN CAPAIAN PERTAHUN			PERBANDINGAN CAPAIAN RENSTRA			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	2018	2019	2020	2020	2023	CAPAIAN	
	OUTCOME											
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Persentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	56%	100%	178.57%	26%	243%	178%	178%	100%	100%	BPBD
		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	86%	90%	104.65%	111%	52%	104%	104%	100%	100%	BPBD
		Persentase Masyarakat Korban Bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP	100%	85%	85.00%	100%	50%	85%	85%	100%	100%	BPBD
2	Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban bencana	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100.00%	114%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD



**LAMPIRAN LKIP**  
**CAPAIAN KINERJA OUTPUT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kegiatan (Output)	Kinerja Output Tahun 2020				% Capaian Kinerja output Tahun Sebelumnya	Perbandingan Kinerja	Keandalan Data	
				Satuan	Target	Realisasi	% Capaian			Formulasi	Sumber Data
	OUTPUT									Ada/Tidak Ada	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik yang terbayar	Rekening	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun	Kali	576	576	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi	kegiatan	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	paket	48	48	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kegiatan	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan (STNK) secara rutin/berkala selama satu tahun anggaran	Paket	8	7	87.50%	100.00%	87.50%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang tersusun	Laporan	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
4	Penunjang Pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah di susun	Dokumen	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan website aplikasi/database yang dikelola	Kegiatan	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
5	Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	Jumlah pemantauan lokasi daerah rawan bencana	Kali	30	30	100.00%	0.00%	#DIV/0!	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Permebrdayaan Posko Siaga Bencana	Jumlah makan minum TRC yang melakukan posko siaga bencana	Kali	5688	5688	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah kegiatan PRB yang di laksanakan	Kegiatan	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi penanggulangan bencana	Dokumen	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator Kegiatan (Output)	Kinerja Output Tahun 2020				% Capaian Kinerja output Tahun Sebelumnya	Perbandingan Kinerja	Keandalan Data	
				Satuan	Target	Realisasi	% Capaian			Formulasi	Sumber Data
6	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	Jumlah peninjauan lokasi dan penanganan korban bencana	Kali	80	80	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Jumlah kebutuhan dasar yang tersalur terhadap korban bencana	Jenis	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan
7	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Jumlah lokasi yang diidentifikasi dan diverifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana	Kali	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pasca bencana	Laporan	1	0	0.00%	100.00%	0.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang terdampak bencana	Paket	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	Ada	Lap Realisasi Fisik dan Anggaran & Evaluasi Renja Per Triwulan